

Mesir-Israel Era Anwar Sadat: Antara Perdamaian dan Perpecahan

Ichsan Nur Hidayat¹, Danil Folandra²

¹ Uin Sunan Kalijaga, Yogyakarta, ²Uin Imam Bonjol Padang

hichsannur@gmail.com, danilfolandra1221@gmail.com

Abstrack

This article aims to examine the responses of Arab and Western countries to the Egypt-Israel peace agreement during President Anwar Sadat's era. A country that had previously been at the forefront of opposition to Israel, eventually reversed course by establishing cooperative relations with Israel. This research is qualitative and based on literature studies. Data were collected from research findings such as books, journals, and other data supporting this study. The study found that there were differences in the responses between Arab and Western countries to the Egypt-Israel peace agreement. Western countries, especially the United States, responded positively to Anwar Sadat's decision as a form of peace between nations. On the other hand, Arab countries expressed disappointment over what they considered a betrayal of the Arab struggle against Israel. This opposition came from various quarters, both within Egypt and from other Arab countries. For them, this decision marked the beginning of the fragmentation of Arab nations.

Keywords: *Anwar Sadat, Egypt-Israel, Peace, Fragmentation.*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk melihat respon negara-negara Arab dan Barat terhadap keputusan perdamaian Mesir-Israel era Presiden Anwar Sadat. Negara yang sebelumnya menjadi garda terdepan dalam penentangannya terhadap Israel justru dalam perjalanannya berbalik arah dengan melakukan hubungan kerjasama dengan Israel. Penelitian ini dalam bentuk kualitatif yang berbasis kepustakaan. Data dikumpulkan melalui hasil-hasil riset seperti buku jurnal serta data lain yang mendukung penelitian ini. Studi ini menemukan bahwa adanya perbedaan respon antara Negara-negara Arab dan Barat terhadap perjanjian damai Mesir-Israel. Negara Barat terutama Amerika menanggapi positif dari keputusan Anwar Sadat sebagai bentuk perdamaian antar Negara. Sebaliknya pihak Negara Arab sendiri mengalami kekecewaan atas penghianatan perjuangan bangsa Arab menentang Israel. Penentangan ini terjadi dari berbagai kalangan baik internal Negara mesir maupun Negara-negara Arab lainnya. Keputusan ini bagi mereka justru awal dari perpecahan Negara-negara Arab.

Keywords: *Anwar Sadat, Mesir-Israel, Perdamaian, Perpecahan*

Pendahuluan

Sejarah mencatat bahwa Mesir merupakan negara di kawasan Afrika utara yang cukup berpengaruh di kalangan negara-negara Arab. Negara ini memiliki peran signifikan dalam dinamika perpolitikan negara-negara Arab (Hermawati, 2005). Perkembangan politik Mesir terbentuk pasca merdeka dari

Inggris pada 1922 (Peter M.Holt, Hopwood, 2024). Pada tahun 1945, Mesir ikut menjadi pemrakarsa terbentuknya Liga Arab. Sebagai Bangsa Arab dan akar historis keislaman, Mesir dan negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab berkomitmen untuk mendukung kemerdekaan Palestina serta membendung kekuatan Zionis yang

berusaha menduduki Palestina sejak kekalahan Turki Utsmani pada Perang Dunia I (Karta Raharja Ucu, 2021).

Ketika Zionis mendeklarasikan Israel pada 14 Mei 1948 (Britannica.com, n.d.) sehari kemudian Mesir bersama Suriah, Irak, Lebanon, Yordania, dan Arab Saudi menyatakan perang terhadap Israel (Perang Arab-Israel I). Setelah peristiwa ini, orang-orang Palestina banyak yang mengungsi. Ketika mereka hendak kembali ke negaranya yang sudah dikuasai Israel, mereka ditolak. Hal ini membuat Mesir berinisiatif memberikan bantuan senjata dan melatih para sukarelawan dari Jalur Gaza untuk melawan Israel. Hal ini dilakukan karena Mesir berupaya untuk membantu Palestina. Hingga 1960-an, gerilyawan Palestina yang juga dibantu oleh Suriah terus melawan Israel. Kemudian pada April 1967, perang kian meningkat ketika Israel dan Suriah terlibat pertempuran udara, yang menghancurkan 6 pesawat jet Suriah (Goldstein, 2018).

Mesir kembali terlibat perang dengan Israel pada tahun 1967. Situasi Arab dengan Israel saat itu memang sedang memanas. Mesir mendapat informasi dari Uni Soviet bahwa Israel tengah memindahkan pasukannya ke perbatasan utara dengan Suriah. Guna mendukung Suriah (yang juga mendukung Palestina), Gamal Abdul Nasser (selanjutnya disebut Nasser) Presiden Mesir kala itu memerintahkan Pasukan Mesir ke Semenanjung Sinai. Kemudian, pada 5 Juni Israel mulai melancarkan serangan udara yang melumpuhkan angkatan udara Mesir. Serangan ini menandai awal dari konflik yang kemudian dikenal dengan Perang

Enam Hari (Six Day War). Konflik ini berlangsung hingga 10 Juni 1967 dan menghasilkan kemenangan strategis bagi Israel. Dalam jangka waktu yang relatif singkat ini Israel berhasil menguasai sejumlah wilayah strategis seperti Semenanjung Sinai (Mesir), Jalur Gaza (Mesir), Tepi Barat (Yordania), Yerusalem Timur (Yordania), dan Dataran Tinggi Golan (Suriah) (Garaudy, 2000).

Pada 1970 Gamal Abdul Nasser wafat, dan kepemimpinan Mesir dilanjutkan oleh Anwar Sadat (Ron David, 2007). Di awal masa menjabat, Anwar Sadat mengikuti pendahulunya untuk berperang dengan Israel. Namun dalam perkembangannya, Anwar Sadat menyingkirkan hal-hal yang menurutnya menghambat perkembangan Mesir. Ia lebih condong kepada Amerika Serikat (Adhi Cahya Fahadayna, 2013) berbeda dengan pemerintahan Gamal Abdul Nasser yang lebih dekat dengan Uni Soviet. Meskipun saat itu Anwar Sadat merupakan Wakil Presidennya (Noor, 2014). Anwar Sadat mulai mendekati pejabat-pejabat Uni Soviet dari Mesir. Ia melakukan hal tersebut karena perekonomian Mesir menurun akibat perang berkepanjangan dengan Israel. Anggaran negara banyak digunakan untuk keperluan militer. Ia juga menginginkan Semenanjung Sinai yang dekat dengan Terusan Suez dikembalikan kepada Mesir. Amerika Serikat dinilai sebagai pihak yang bisa membantu keinginan Anwar Sadat tersebut (R. Sihbudi, 2007). Maka ia berusaha menyingkirkan pengaruh Uni Soviet, dan sejak saat itulah Amerika Serikat lebih leluasa untuk mempengaruhi Mesir (Farida, 2014). Upaya pendekatan Anwar

Sadat kepada Israel dimulai pada tahun 1977 saat ia mengunjungi Israel, yang nantinya membuahkan perdamaian antara Mesir dengan Israel pada 26 Maret 1979 (Islamiyah, N., & Trilaksana, 2016).

Studi ini bertujuan untuk melihat respons negara-negara Arab dan Barat terhadap perdamaian Mesir dengan Israel pada masa pemerintahan Anwar Sadat pada 1978-1981. Respons yang dimaksud adalah sikap maupun tindakan dari negara-negara Arab dan Barat atas upaya hingga terjadi perdamaian Mesir dan Israel pada 26 Maret 1979. Perdamaian tersebut juga mempunyai dampak besar bagi Mesir dan kawasan negara Arab. Mesir yang saat itu menjadi tuan rumah bagi Liga Arab dan berkomitmen mendukung Palestina serta membendung Israel, malah berbalik haluan untuk berdamai dengan Israel karena persoalan ekonomi dan geografi, sehingga membuat keputusan yang pragmatis. Bahkan Rakyat Mesir juga semakin melawan Anwar Sadat, ketika pemerintahannya mulai otoriter, represif, (Widyarsa, 2014) dan menghegemoni (Isma Fauziyah, 2019) penentang perdamaian tersebut. Studi ini penting mengingat perdamaian Mesir dan Israel merupakan titik awal perubahan politik negara Arab terhadap Israel dan juga berpengaruh bagi negara-negara Arab lainnya.

Sejauh ini studi yang menyinggung terkait hubungan Mesir dengan Israel telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Studi yang ada dapat dikategorikan dalam tiga aspek. Pertama perundingan perdamaian mesir dan Israel. Kekalahan yang dihadapi mesir dan Negara arab serta kebuntuan upaya dalam menekan Israel menjadikan Anwar Sadat

memutuskan untuk melakukan dialog dengan Israel (Abadi, 2019; Cohen-Almagor, 2019; Shlomo, 2017; Yahel, 2016) kedua, membahas bagaimana kebijakan politik luar negeri Mesir era Anwar Sadat. Ia memiliki metode tersendiri dalam membangun relasi di tingkat lokal, regional maupun global (Boutros-Ghali, 2012; Kassem, 2023; Procel & Jednaszewski, 2020; Sorby, 2021). Ketiga, studi yang mengkaji keterlibatan beberapa Negara lain dalam perdamaian mesir-israel (Blanga, 2015; Pressman, 2022; Treston Paul Chandler, 2016). Berbeda dengan kajian oleh peneliti sebelumnya, studi ini menyoroti respon terhadap perdamaian antara Mesir dan Israel terutama Negara-negara Arab dan Eropa.

Penelitian ini merupakan studi sejarah yang menggunakan pendekatan kualitatif berbasis kepustakaan. Metode sejarah yang diterapkan dalam penelitian ini mencakup empat tahap: pertama, heuristik, yaitu pengumpulan sumber-sumber yang relevan; kedua, verifikasi, yang melibatkan kritik terhadap keaslian dan kredibilitas sumber; ketiga, interpretasi, yang berfokus pada penafsiran fakta-fakta sejarah; dan keempat, historiografi, yang berhubungan dengan penulisan dan penyajian narasi sejarah.

Anwar Sadat: Dari Dunia Militer Hingga Politik

Anwar Sadat, yang lahir pada 25 Desember 1918 di Mit Abu Al-Kum, Minufiyah, Mesir, merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah Mesir dan dunia Arab. Ayahnya, Mohammed El-Sadaty, merupakan warga Mesir, sementara ibunya, Sitt El-Barrien, berasal dari Sudan. Sejak masa kecilnya, Anwar

Sadat dipengaruhi oleh karakter dan nilai-nilai yang diajarkan oleh neneknya, Sitt Om-Mohammed. Neneknya memainkan peran penting dalam membentuk kepribadian dan pandangannya tentang kehidupan. Meskipun menghadapi berbagai kesulitan, keluarga Sadat berusaha memberikan pendidikan yang layak, yang menjadi fondasi penting bagi perkembangan karier politik dan kepemimpinannya di kemudian hari (Putri Meilasari, 2011).

Ketika berusia tujuh tahun ia pindah ke Kairo bersama keluarganya kemudian bersekolah di sana (Achmad Munif, 2007). Saat menempuh sekolah menengah di Kairo, keluarganya hidup secara sederhana. Gaji ayahnya yang terbatas digunakan untuk membiayai tiga belas bersaudara. Untuk makan, mereka membuat roti sendiri dengan tungku besar. Sedangkan penduduk Kairo yang lain, umumnya mereka membeli roti di toko. Untuk pakaian sekolah, Anwar Sadat hanya memiliki satu stel jas tua. Diusia ke-22 tahun, Anwar Sadat lulus dari Akademi Militer Kerajaan Kairo. Kemudian bergabung dalam militer Mesir. Saat bertugas di Manqabat, Anwar Sadat pertama kali bertemu dengan Gamal Abdul Nasser. Ketika tiba di Manqabat, ia menganggap dirinya sudah menjadi revolusioner yang lebih matang, dibandingkan dengan rekan perwiranya yang lain. Hal itu dikarenakan kebanyakan dari mereka tidak mempunyai pendidikan politik (Sadat, 1983).

Pada saat Perang Dunia II masih berlangsung, Anwar Sadat berusaha untuk mengusir kolonial Inggris dari Mesir. Namun ia tertangkap dan dipenjara

oleh Inggris pada tahun 1942.(Wagner, 2007) Ia baru bebas dari penjara pada 1945. Setelah bebas dari penjara, ia kembali dipenjara pada 1946 terkait terbunuhnya menteri keuangan Mesir yang pro terhadap Inggris, Amin Othman. Anwar Sadat kembali bebas dari penjara pada 1948. Pada tahun yang sama, Anwar Sadat juga terlibat dalam Perang Arab-Israel (Achmad Munif, 2007).

Pangkat militer Anwar Sadat terus mengalami kenaikan, pada 1952 ia berpangkat mayor dan menjadi salah satu pemimpin dalam Revolusi Mesir yang menggulingkan kekuasaan monarki Raja Farouk. Revolusi tersebut dipimpin oleh Gamal Abdul Nasser. Saat itu, Anwar Sadat menjadi anggota Dewan Komando Revolusioner. Di masa berikutnya, hubungannya dengan Gamal Abdul Nasser mengantarkan Anwar Sadat ke jabatan politik yang strategis (Kamel, 2011).

Karier militer Anwar Sadat beralih menjadi karier politik pada 1954, saat ia diangkat menjadi menteri penerangan. Namun pada 1973 saat sudah menjabat sebagai presiden, Anwar Sadat menorehkan prestasi bagi militer Mesir di Perang Yom Kippur melawan Israel. Pada perang tersebut, Anwar Sadat berhasil membangkitkan moral militer Mesir yang sudah merosot dengan keberhasilan memukul mundur pasukan Israel. Anwar Sadat menuai pujian pada keberhasilannya tersebut. Padahal, sebelumnya rakyat Mesir menganggap bahwa perang dengan Israel itu berarti menjerumuskan diri kepada kekalahan (Kamel, 2011).

Setelah berhasil menggulingkan monarki Mesir, para petinggi militer yang

terlibat mulai menduduki jabatan pemerintahan. Anwar Sadat merupakan salah satunya. Kemudian pada 1969, Anwar Sadat menjadi wakil presiden dari Gamal Abdul Nasser. Karier politiknya meningkat menjadi presiden Mesir pada 15 Oktober 1970 menggantikan Gamal Abdul Nasser. Ia didampingi Ali Sabri sebagai wakil presiden. Saat menjabat presiden, ia sadar bahwa bayang-bayang kekuatan Gamal Abdul Nasser masih ada dan mereka berada di pihak Ali Sabri yang menjadi wakil presidennya. Ia menyadari jika pemerintahannya ingin tetap kuat, maka pengaruh Nasser harus dihilangkan atau dieliminir (Putri Meilasari, 2011). Anwar Sadat kemudian mengambil tindakan tegas terhadap Ali Sabri dan pemimpin lainnya yang berupaya menggunakan Partai Persatuan Sosialis Arab sebagai pusat kepemimpinan alternatif. Pada Mei 1971, Ali Sabri ditangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan militer atas tuduhan melawan presiden. Namun, hukumannya diringankan menjadi seumur hidup oleh Anwar Sadat. Tetapi Ali Sabri hanya menjalani hukuman selama 10 tahun, dan dibebaskan karena alasan kesehatan (Pearson, 1991).

Menyadari bahwa pengaruh Uni Soviet berada pada pihak lawan politiknya, Anwar Sadat meminta dukungan pemerintah Amerika Serikat. Pada Mei 1971, Anwar Sadat mengajukan permohonan persahabatan luar biasa dan rahasia kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, William Rogers. Kemudian Anwar Sadat mengusir para pejabat Uni Soviet dari Mesir pada Juli 1972. Kebijakan Anwar Sadat membawa Mesir menjauh dari pengaruh sosialis Uni

Soviet, dan lebih dekat dengan pengaruh kapitalis Barat, khususnya Amerika Serikat. Pada April 1974, Mesir mulai menerapkan ekonomi terbuka dengan program *Al-Infithah* yang diterapkan pemerintahan Anwar Sadat (Alterman, 1998).

Anwar Sadat menyadari pentingnya Mesir untuk membentuk aliansi jangka panjang, untuk mencapai tujuan jangka panjang. Ia mempunyai dua tujuan utama, yaitu mendapatkan kembali Semenanjung Sinai dan memperbaiki ekonomi yang lesu. Sempat menempuh jalur militer dengan Perang Yom Kippur melawan Israel pada 1973, namun hal tersebut dimaksudkan untuk menekan Israel ke jalur damai untuk mencapai tujuannya yakni mendapatkan kembali Semenanjung Sinai dan memperbaiki ekonomi yang lesu. Namun, karier politik Anwar Sadat terhenti ketika ia ditembak dan terbunuh pada 6 Oktober 1981 (Achmad Munif, 2007).

Hubungan Mesir-Israel Sebelum dan Ketika Kepemimpinan Anwar Sadat

Secara umum, kondisi politik di kawasan negara-negara Arab pada kurun waktu 1948-1970 sangat bermusuhan dengan Israel. Israel merupakan musuh dan tantangan bersama bagi negara Arab dalam kaitannya dengan Islam dan politik. Konflik antara Israel dengan negara Arab telah berlangsung sejak sebelum kemunculannya pada 1948 (Garaudy, 2000) Hal tersebut dikarenakan rencana untuk mendirikan negara Israel, telah tercetus sejak 1897 oleh Organisasi Zionis Dunia atau *World Zionist Organization* (Misri A. Muchsin, 2015). Konflik yang disebabkan oleh Israel terhadap dunia Islam meliputi isu

wilayah, politik, agama, keamanan, dan hak asasi manusia. Negara Arab hampir selalu turut serta dalam upaya penyelesaian konflik yang disebabkan oleh Israel, khususnya mengenai pendudukan tanah Palestina. Eksistensi Israel di atas tanah Palestina terus menjadi sumber konflik hingga sekarang (Laura Zittrain Eisenberg dan Neil Caplan, 2010).

Pada periode awal pembentukan Israel, negara-negara Arab menunjukkan solidaritas dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina. Dukungan tersebut diwujudkan melalui upaya diplomasi serta penyediaan dukungan militer kepada Palestine Liberation Organization (PLO). Salah satu negara yang paling aktif dalam dukungan ini ialah Mesir. Persekutuan antara Mesir dengan Israel pada masa awal kepemimpinan Anwar Sadat, tidak terlepas dari pengaruh masa sebelumnya. Mesir bersama dengan negara Timur Tengah lainnya seperti Yordania, Irak, Suriah, dan Lebanon pernah berperang melawan Israel pada 1948. Kemudian pada 1956, Mesir juga terlibat konflik dengan Israel terkait Terusan Suez. Pada konflik tersebut, Inggris dan Prancis ikut mengintervensi karena memiliki kepentingan terhadap Terusan Suez. Mesir bersama Yordania dan Suriah kembali terlibat dalam pertempuran dengan Israel pada 1967 yang dikenal dengan Perang Enam Hari atau *Six Day War*. Pada Perang Enam Hari, Israel berhasil merebut wilayah Semenanjung Sinai, Gaza, Tepi Barat, dan Dataran Tinggi Golan (Britannica.com).

Anwar Sadat dikenal dengan perilaku politik yang memusuhi Israel, yang tercermin dalam penerapan kebijakan luar negeri anti-Israel. Sikap ini

berakar dari Kebijakan *Three Noes* yang disepakati dalam Resolusi Khartoum, hasil Konferensi Tingkat Tinggi Liga Arab di Sudan pada tahun 1967. Dalam resolusi tersebut, anggota Liga Arab, termasuk Mesir, sepakat untuk menolak tiga prinsip dasar: tidak ada pengakuan terhadap Israel, tidak ada negosiasi dengan Israel, dan tidak ada perdamaian dengan Israel. Pada tahun 1970, Anwar Sadat memutuskan untuk melanjutkan gencatan senjata dan tidak meneruskan Perang Atrisi yang sebelumnya dimulai pada Maret 1969 oleh Gamal Abdul Nasser. Perang ini bertujuan untuk merebut kembali Semenanjung Sinai dari tangan Israel. Gencatan senjata untuk Perang Atrisi telah disepakati pada bulan Agustus 1970, saat pemerintahan Nasser. Meskipun Sadat melanjutkan gencatan tersebut, ia tetap berkomitmen untuk merebut kembali Semenanjung Sinai.

Dalam upaya untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang telah dicaplok, negara-negara Arab menghadapi tantangan serius akibat perpecahan internal dan perselisihan di antara mereka. Ketidakkompakkan ini menjadi penghalang bagi upaya kolektif dalam menahan kekuatan Israel. Perbedaan pendapat yang muncul akibat kepentingan nasional masing-masing negara berkontribusi pada hilangnya solidaritas dan kerja sama. Fenomena ini dapat dilihat pada kebijakan Mesir di bawah kepemimpinan Anwar Sadat, yang mencerminkan pergeseran dalam dinamika politik Arab dan dampaknya terhadap perjuangan Palestina. Kendati pada masa awal kepemimpinan Anwar Sadat, masih bersikap sama dengan

Gamal Abdul Nasser untuk memusuhi Israel.

Pada 1971 ia mulai membawa Mesir menjadi lebih terbuka terhadap Israel, sehingga berpengaruh terhadap kekuatan dukungan Mesir terhadap Palestina. Hal ini menjadi awal keretakan persatuan negara-negara Arab. Kepemimpinan Anwar Sadat memberikan dampak yang signifikan bagi Mesir dan dunia Arab terhadap Israel. Periode ini ditandai dengan perubahan hubungan bilateral antara Mesir dengan Israel, yang awalnya bermusuhan menjadi berdamai. Secara resmi, Anwar Sadat secara mengumumkan bahwa Mesir bersedia mempertimbangkan negosiasi dengan Israel, jika Israel bersedia menarik diri dari Semenanjung Sinai. Namun Israel tetap tidak bersedia memberikan komitmen mengenai wilayah perbatasan, dan membuat percobaan perundingan tersebut gagal. Wilayah Semenanjung Sinai yang memiliki potensi ekonomi besar itu pun masih menjadi perebutan antara Mesir dengan Israel (Jewish Virtual Library).

Perjanjian antara Mesir dengan Israel secara resmi diberi judul *Framework for Peace in the Middle East*, yang berarti Kerangka Perdamaian di Timur Tengah pada 1978. Perjanjian tersebut kemudian lebih dikenal dengan nama Perjanjian Camp David. Perjanjian ini merupakan kelanjutan atas keberhasilan Anwar Sadat dalam menekan Israel pada Perang Yom Kippur untuk menuju perundingan perdamaian. Setelah Perang Yom Kippur mencapai kesepakatan gencatan senjata pada 11 November 1973 (Britannica.com).

Anwar Sadat melanjutkan upayanya untuk mencapai perdamaian dengan

mengunjungi Amerika Serikat dan bertemu Presiden Gerald Ford pada 27 Oktober 1975. Tujuan utama Anwar Sadat bertemu dengan Gerald Ford adalah untuk membujuknya agar Amerika Serikat mengurangi pengiriman senjata ke Israel. Tidak sampai disitu ia melanjutkan upaya perdamaannya dengan mengunjungi pemerintah Israel di Yerusalem atas undangan dari Perdana Menteri Israel Menachem Begin pada 19 November 1977. Setelah kunjungan Anwar Sadat ke pemerintah Israel, Menachem Begin Perdana Menteri Israel berencana berkunjung balik ke Mesir. Namun, rencana tersebut gagal terealisasi. Amerika Serikat yang juga turut mengintervensi rencana perdamaian tersebut, dan melihat kegagalan kunjungan balik Menachem Begin sebagai ancaman akan gagalnya rencana perdamaian Mesir dengan Israel. Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter atas saran dari Rosalynn Carter yang merupakan istrinya, berinisiatif mengundang Anwar Sadat dan Menachem Begin ke Camp David. Anwar Sadat dan Menachem Begin menerima undangan dari Jimmy Carter untuk pertemuan di Camp David (Carter, 2024).

Rencana awal untuk menyelesaikan perjanjian perdamaian adalah dalam waktu tiga bulan setelah penandatanganan Perjanjian Camp David (Ian J. Bickerton dan Carla L. Klausner, 2019). Namun tenggat waktu tersebut tidak berhasil direalisasikan. Hingga Maret 1979, perjanjian perdamaian yang direncanakan belum juga terlaksana. Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter, kemudian kembali mengintervensi agar perdamaian yang direncanakan segera

terlaksana. Jimmy Carter mengunjungi pemerintah Israel pada 10 Maret 1979, dengan sebelumnya sudah mendapat persetujuan dari Anwar Sadat untuk bernegosiasi atas nama Mesir. Pertemuan tersebut menghasilkan jaminan Amerika Serikat atas pasokan minyak Israel, penghilangan referensi mengenai peran khusus Mesir di Gaza, dan perjanjian Israel untuk membuat sejumlah isyarat sepihak kepada Palestina, delegasi Amerika Serikat (atas nama Mesir) dan Israel menyetujui teks perjanjian pada tanggal 13 Maret 1979. Anwar Sadat pun juga menyetujui poin-poin tersebut (Carter, 2024).

Setelah Mesir dan Israel (dengan intervensi Amerika Serikat) menyetujui rancangan final dokumen perjanjian perdamaian, penandatanganan pun dilakukan pada 26 Maret 1979 di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat. Upacara penandatanganan Perjanjian Perdamaian Mesir-Israel dipimpin oleh Jimmy Carter (Glass, 2019). Perjanjian tersebut berisi sembilan pasal, satu lampiran militer, satu lampiran tentang hubungan bilateral, notulen kesepakatan yang menafsirkan pasal-pasal utama, jadwal penarikan dan perjanjian pertukaran duta besar, pengaturan keamanan dan perundingan otonomi. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Anwar Sadat dan Menachem Begin, serta Jimmy Carter sebagai saksi (Peace Document, 1979).

Respon Terhadap Perdamaian Mesir dan Israel

Mesir merupakan negara yang mempunyai pengaruh signifikan di kawasan Timur Tengah, khususnya pada bidang politik. Keberadaan Israel juga

kerap menjadi batu sandungan politik bagi negara-negara di Timur Tengah, terutama mengenai isu Palestina. Namun karena dukungan dari dunia Barat khususnya Amerika Serikat, membuat Israel mempunyai kekuatan untuk bertahan dari tekanan politik Timur Tengah. Tercapainya Perjanjian Perdamaian Mesir-Israel, tentu saja mengundang respons dari Timur Tengah dan Barat. Timur Tengah memberikan respons negatif, karena Mesir dinilai telah berkhianat terhadap perjuangan melawan Israel. Sedangkan Barat memberi respons positif, karena bisa menambah intervensi di Timur Tengah melalui Mesir dan dinilai sebagai pintu perdamaian global. Berikut rincian pembahasannya.

a. Respons Positif dari Barat

Perdamaian Mesir dan Israel mendapat respons positif dari Barat, karena dianggap sebagai gerbang baru untuk mengintervensi politik Timur Tengah. Selain itu perdamaian yang terjadi antara Mesir dengan Israel dinilai bukan hanya untuk kawasan Timur Tengah, namun juga untuk global. Pihak Barat yang memberikan respons positif yaitu Yayasan Nobel dari Swedia dan Norwegia, serta Amerika Serikat. Anwar Sadat menerima Penghargaan Nobel, atas perdamaian Mesir dengan Israel. Penghargaan ini secara umum dianggap sebagai penghargaan paling bergengsi pada pencapaian intelektual di seluruh dunia. Yayasan Nobel mempunyai empat institusi di Swedia dan Norwegia. Penghargaan untuk ilmu pengetahuan alam (bidang fisika, kimia, dan ekonomi), fisiologi (kedokteran), dan sastra berada di Swedia. Sedangkan penghargaan untuk perdamaian berada di Norwegia, dan

institusi inilah yang memberikan penghargaan kepada Anwar Sadat. (Encyclopedia Britannica, 2024)

Komite Nobel di Norwegia memberikan penghargaan kepada Anwar Sadat atas pencapaian upaya perdamaian Mesir dengan Israel (Jim Hoagland, 1978). Penghargaan tersebut diserahkan dalam upacara pada 10 Desember 1978 di Oslo Norwegia sebagai respons atas perdamaian yang Anwar Sadat upayakan. Beberapa pengamat percaya bahwa pemberian hadiah kepada Anwar Sadat, sebelum perjanjian damai ditandatangani secara resmi, merupakan jaminan untuk memastikan bahwa ia benar-benar melanjutkan perundingan dan menyimpulkannya dengan sebuah perjanjian (Israeled.org).

Anwar Sadat menerima Penghargaan Nobel bersama dengan Menachem Begin. Mereka mendapatkan medali, diploma, (Gwladys Fouche, 2024) dan uang sekitar 165.000 dolar secara bersama-sama. Hadiah uang yang Anwar Sadat dapatkan, sebagian ia sumbangkan untuk kampung halamannya (Jim Hoagland, 1978). Sedangkan Jimmy Carter yang menengahi Perjanjian Camp David, mendapatkan Penghargaan Nobel Perdamaian pada tahun 2002 (History, 2020).

Tidak hanya itu, Sejak terbukanya hubungan antara Mesir dengan Amerika Serikat pada masa Anwar Sadat, ekonomi Mesir menjadi lebih bertumbuh. Tercapainya Perjanjian Camp David dan Perjanjian Perdamaian Mesir-Israel yang ditengahi oleh Amerika Serikat, juga membawa insentif ekonomi bagi Mesir. Amerika Serikat memberikan bantuan dana sebesar empat miliar dolar kepada

Mesir dan Israel guna pengaturan keamanan bersama. Bantuan tersebut akan diberikan selama tiga tahun, mulai dari 1979. Amerika Serikat juga memberikan peralatan militer kepada Mesir. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Harold Brown dilaporkan menerima permintaan Mesir yang mencakup 300 pesawat tempur F-16, 600 tank dan 2.000 pengangkut personel lapis baja. Selain itu, Amerika Serikat juga menyediakan beberapa kapal perang tua yang bisa digunakan untuk berpatroli di Laut Merah. Namun sebagai timbal balik dari bantuan-bantuan tersebut, Mesir harus menjaga hubungan baik terhadap Israel. Sejak saat itu, militer Mesir mulai ketergantungan kepada Amerika Serikat, karena sebagian besar alutsista Mesir berasal dari Amerika Serikat. Selama pemerintahan Jimmy Carter di Amerika Serikat, Mesir telah menerima bantuan dana sebesar 1,1 miliar dolar sebagai bantuan militer (Nurdiassa, 2015).

Dampak selanjutnya dari respon barat ialah adanya Perjanjian Perdamaian Mesir-Israel yang menghasilkan kerja sama antara keduanya dan didukung oleh Amerika Serikat. Sejak itu Israel membongkar permukimannya di Semenanjung Sinai, dan mengembalikannya kepada Mesir. Sebagai imbalannya, Mesir mengakui kedaulatan Israel sebagai negara. Hubungan yang dekat dan kerja sama antara Mesir dengan Israel terus didukung oleh Amerika Serikat. Bahkan Amerika Serikat juga mempersyaratkan Mesir untuk menjaga hubungan baiknya dengan Israel atas bantuan-bantuan yang diberikan oleh Amerika Serikat.

Respons Negatif dari Negara-negara Arab

Perjanjian Perdamaian Mesir dengan Israel menjadi momen yang mendapat banyak perhatian negara-negara Arab. Kebijakan Anwar Sadat untuk berdamai dengan Israel dianggap tidak memperhatikan perjuangan bangsa Arab dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina, dan menimbulkan respons negatif di kalangan negara-negara Arab. Respons negatif muncul dari kalangan ulama, sipil, dan pejabat. Respons tersebut berasal dari Mesir, Suriah, Palestina, Arab Saudi, Libya, dan Yordania.

Respons negatif dari kalangan ulama terhadap perdamaian Mesir dan Israel muncul dari dalam negeri Mesir. Ulama Ikhwanul Muslimin menolak Perjanjian Camp David 1978 dan perdamaian Mesir-Israel 1979, (Freedman, 2019) karena dinilai mengabaikan Palestina dan Masjid Al-Aqsha. Pada 1979 Ikhwanul Muslimin menggelar demonstrasi di Minya dan Asyut untuk menolak perdamaian dengan Israel. Demonstrasi tersebut juga menggambarkan sikap Ikhwanul Muslimin yang tidak percaya kepada Anwar Sadat dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina.

Ikhwanul Muslimin saat itu dipimpin oleh Umar At-Tilmisani, yang merupakan ketua ketiga. Pada awal kepemimpinan Anwar Sadat, Ikhwanul Muslimin dekat dengan pemerintah. Namun sejak Mesir membuka diri kepada Amerika Serikat, Ikhwanul Muslimin kerap menentang kebijakan pemerintah. Karena pengaruh Ikhwanul Muslimin yang cukup kuat terhadap masyarakat Mesir, penolakan yang mereka lakukan

juga mempengaruhi masyarakat sipil untuk mengambil tindakan yang serupa. Anwar Sadat bahkan sampai mengambil tindakan tegas terhadap pemuka agama yang menentang kebijakan perdamaian dengan Israel. Terdapat tujuh imam masjid dan delapan uskup gereja Koptik yang ditahan. Penerbitan yang memuat kritik juga ditutup, dua dari pihak Kristen dan tiga dari pihak Islam, termasuk *Ad-Da'wah* dari Ikhwanul Muslimin. Sepuluh perkumpulan Islam dibubarkan, sebagian dananya dibekukan, dan 65 masjid yang mengkritik dilakukan penggantian imam dengan orang yang dipilih dan diawasi (Farida, 2014).

Di samping ketidaksetujuan ulama banyak masyarakat sipil Mesir yang menaruh perhatian dengan keputusan Anwar Sadat untuk berdamai dengan Israel. Masyarakat sipil Mesir dari golongan Muslim, komunis, liberal, dan sastrawan bersama-sama menentang Perjanjian Camp David 1978 dan perdamaian Mesir-Israel 1979. Sejak saat itu, terjadi ketegangan politik antara pemerintah dengan sipil. Untuk mempertahankan kebijakannya, Anwar Sadat bersikap tegas terhadap pihak-pihak yang dinilai membangkang. Pada Oktober 1981 Anwar Sadat memerintahkan untuk menangkap dan memenjarakan 1.600 orang yang dianggap mengganggu stabilitas politik dalam negeri Mesir. Salah satu orang yang dipenjarakan adalah sastrawan terkenal, yaitu Nawal El-Sadawi (Kamil, 2008).

Nawal El-Sadawi kemudian menulis karya berjudul *Memoirs from the Women's Prison* sebagai bentuk perlawanan. Karya tersebut menggambarkan pengalamannya saat dipenjara atas tuduhan melawan

sistem pemerintah. Karya tersebut juga memuat kesaksian langsung tentang perlawanan wanita terhadap kekerasan negara dan wawasan yang menarik tentang pembentukan komunitas wanita. Nawal El-Sadawi menjelaskan bagaimana tahanan politik, baik intelektual sekuler maupun penganut Islam, membentuk aliansi untuk menuntut kondisi penjara yang lebih baik dan mempertahankan kewarasannya di dalam sel yang sempit. Karya tersebut diakui sebagai karya klasik tentang penjara yang menggugah simpati dan kemarahan serta menyentuh siapa pun yang peduli tentang penindasan politik, termasuk kebebasan berpendapat untuk menolak perdamaian Mesir dan Israel (Sa'dāwī & Booth, 1994).

Walaupun sudah terjadi penangkapan terhadap masyarakat yang menentang kebijakan Anwar Sadat, namun masyarakat sipil Mesir tetap melakukan demonstrasi untuk mengutuk kejahatan Israel kepada rakyat Palestina yang saat itu tengah terjadi, dan meminta pemerintah Mesir untuk menghentikannya. Masyarakat sipil Mesir juga meminta kepada pemerintah untuk membuka gerbang perbatasan di Rafah, agar warga Palestina bisa mengungsi ke Mesir untuk menghindari serangan militer dari Israel. Namun Anwar Sadat malah memerintahkan untuk menutup serta menjaga ketat gerbang perbatasan di Rafah dan menolak dokter hingga relawan yang akan masuk ke Gaza. Tidak hanya masyarakat yang berprofesi sebagai dokter dan relawan, respons perlawanan juga datang dari masyarakat yang berprofesi sebagai wartawan. Hasanain Haikal dan Ahmad Khawajah yang merupakan wartawan terkenal, juga

ditangkap dan dipenjara karena ikut memprotes kebijakan perdamaian dengan Israel. (Ulum, 2019)

Pemerintah Mesir juga bertindak represif terhadap masyarakat yang berdemonstrasi. Masyarakat sipil Mesir semakin geram ketika Anwar Sadat mengizinkan Israel untuk melewati wilayah udaranya guna menyerang Gaza. Walaupun Mesir juga menyarankan agar Israel dan Palestina melakukan gencatan senjata, namun daya tawar Mesir sudah melemah karena terlanjur terikat kepentingan dengan Israel dan Amerika Serikat (Ulum, 2019)

Masyarakat sipil di Mesir, Suriah, Palestina, Arab Saudi, Libya, dan Yordania, secara umum menolak perdamaian Mesir dengan Israel. Mereka (terutama masyarakat Palestina), menganggap Anwar Sadat sudah membelot dari persatuan Arab dalam upaya menumpas Israel dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Hal ini wajar terjadi karena sebelumnya Mesir dikenal sebagai pemimpin Negara-negara Arab untuk operasi militer melawan Israel. Ketika Mesir berbalik arah untuk berdamai Israel, masyarakat merasa kecewa terhadap Anwar Sadat. Keputusan Anwar Sadat ini juga mengejutkan para pejabat di Negara-negara Arab. Para pejabat di Negara-negara Arab yang mulanya begitu menghormati Mesir karena memimpin perlawanan terhadap Israel, berubah menjadi amarah dan kekecewaan. Mesir dianggap melakukan keputusan sepihak tanpa melibatkan Liga Arab dan juga mengesampingkan kepentingan Palestina demi kepentingan dalam negeri Mesir.

Negara Arab yang tergabung dalam Liga Arab langsung merespons dengan cepat sebelum Perjanjian Perdamaian Mesir-Israel ditandatangani. Setelah Perjanjian Camp David tercapai pada 17 September 1978, Liga Arab mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT di Kota Bagdad Irak pada 2-5 November 1978. KTT tersebut memutuskan bahwa perjanjian yang ditandatangani Mesir di Camp David merugikan hak-hak rakyat Palestina. Pemerintah Mesir didesak untuk tidak meratifikasi perjanjian tersebut dan menyelaraskan diri dengan Liga Arab. Liga Arab juga membekukan hubungannya dengan Pemerintah Mesir (Niyazi Gunay, 2000)

Setelah Perjanjian Perdamaian Mesir-Israel ditandatangani pada 26 Maret 1979, Liga Arab kembali memberikan respons dengan mengadakan pertemuan pada tanggal 31 bulan yang sama di Kota Bagdad, Irak. Hasil pertemuan tersebut, Liga Arab bersepakat untuk menarik duta besar mereka dari Mesir, merekomendasikan pemutusan hubungan diplomatik dengan Mesir, menanggukkan keanggotaan Mesir di Liga Arab, dan memindahkan kantor Liga Arab dari Kota Kairo Mesir ke Kota Tunis Tunisia. Selain itu, Liga Arab juga menghentikan berbagai macam bantuan kepada Mesir (Ulum, 2019)

Selain respons dari pejabat melalui Liga Arab, respons juga muncul dari lingkup nasional negara-negara Arab. Pemerintah Suriah memberi respons dengan memperingatkan bahwa perdamaian Mesir dan Israel bisa menambah ketegangan di dunia Arab, serta bisa menjadi pemicu perang dunia

yang ketiga. Pemerintah Arab Saudi memberikan respons dengan pernyataan bahwa perdamaian tersebut mengkhianati umat Islam di Palestina, dan mengakui keberadaan Israel di atas Palestina, yang seharusnya Israel menarik diri sepenuhnya dari wilayah Palestina yang diduduki. Pada Mei 1979, Arab Saudi juga menyatakan keluar dari *The Arab Organization for Industrialization* (AOI), perusahaan di Mesir. (Putri Meilasari, 2011) Sedangkan Raja Husein dari Yordania memberikan respons dengan pernyataan bahwa Amerika Serikat telah menyakiti hati orang-orang Arab. Dari pihak Libya, Muammar Qaddafi mengatakan bahwa Anwar Sadat adalah pengkhianat perjuangan bangsa Arab dan Palestina (M. R. Sihbudi, 1991).

Respons yang muncul bukan hanya dari pejabat luar negeri, namun juga berasal dari pejabat militer dalam negeri Mesir. Pada saat parade militer Mesir 6 Oktober 1981, Anwar Sadat menjadi pemimpin parade tersebut untuk memperingati kegemilangan Mesir melawan Israel pada Perang Yom Kippur. Anwar sadat duduk di podium paling depan pada parade tersebut. Ketika barisan truk sedang beriringan, salah satu truk tiba-tiba keluar jalur dan menuju ke arah podium. Seorang tentara berpangkat Letnan Satu, Khalid Islambouli melompat dari truk dan berlari ke arah Anwar Sadat. Anwar Sadat sepertinya mengira bahwa ia akan mendapat penghormatan dari Khalid Islambouli, dan bersiap untuk menerima penghormatan. Namun bukan penghormatan yang Khalid Islambouli berikan, melainkan ia melempar granat dan meledak ketika mengenai dinding podium. Tentara lain yang merupakan

rekan Khalid Islambouli, Atho Thoyal melempar granat kedua. Granat ketiga dilempar kembali oleh Khalid Islambouli, namun tidak meledak. Granat keempat dilempar oleh Abdul Hamid Abdus Salam yang juga tentara rekan Khalid Islambouli. Granat yang dilemparnya di tengah-tengah tamu yang duduk di podium. Sontak, para hadirin di podium terkapar di bawah kursi-kursi (P Meilasari, 2011).

Anwar Sadat lantas berujar “kalian pengkhianat!” dalam bahasa Arab kepada para tentara yang melempari granat. Namun tidak lama kemudian, tentara bernama Husain Abbas memberondong Anwar Sadat dan hadirin lain di podium dengan senapan serbu yang terpasang di atas truk. Sementara itu, Khalid Islambouli menembaki ke arah Anwar Sadat dari depan podium dengan senapan serbu. Anwar Sadat dan beberapa orang di sekitarnya pun berjatuh dengan bersimbah darah. Aksi tersebut berlangsung tidak lebih dari satu menit. Akibat dari penyerangan tersebut Anwar Sadat dan tujuh orang lainnya meninggal dunia, dua puluh orang luka, termasuk pejabat diplomat Amerika Serikat. Penyerangan yang terjadi didalangi oleh insinyur bernama Muhammad Abdus Salam Faroj, dengan eksekutor keempat orang di atas. Tragedi penyerangan tersebut menjadi akhir karier Anwar Sadat, serta merupakan puncak respons penolakan terhadap kebijakan perdamaian Mesir dengan Israel. Para pelaku merupakan anggota dari kelompok Tanzim Al-Jihad (Jr., 1981).

Kesimpulan

Mesir era Abdul Naser merupakan salah satu negara paling getol dalam

perlawanannya terhadap Israel. Hingga akhirnya sikap negara ini berbalik arah ketika di pimpin oleh Anwar Sadat. Bagi Sadat peperangan yang tak kian henti antara negara Arab dengan Israel beserta sekutunya menjadikan negaranya mengalami krisis ekonomi. Untuk keluar dari persoalan tersebut Sadat meyakini bahwa perdamaian dengan Israel mengembalikan keadaan ekonomi negaranya. Ternyata keputusan Sadat ini mendapatkan respon yang berbeda dari dua kubu. Kubu barat terutama Amerika mananggapi positif dari keputusan yang diambil Anwar Sadat. Atas keputusan perdamaianya Anwar Sadat dianugerahi penghargaan Nobel sebagai penghargaan yang cukup bergengsi di dunia internasional. Di samping itu Amerika juga mendanai Mesir dalam beberapa aspek terutama angkatan bersenjata. Di sisi yang berbeda, negara-negara Arab justru kecewa dari keputusan Anwar Sadat yang dianggap telah mengkhianati perjuangan negara Arab selama ini. Perlawanan ini muncul baik dari kalangan ulama, sipil, pejabat maupun militer. Akibat dari perlawanan ini menghentikan kekuasaan Anwar Sadat di tandai dengan kematiannya.

Daftar Pustaka

- Abadi, J. (2019). Israeli-Egyptian Relations: Obstacles to Meaningful Rapprochement. *Journal of South Asian and Middle Eastern Studies*, 43(1), 1-24. <https://doi.org/10.1353/jsa.2019.0001>
- Achmad Munif. (2007). *50 Tokoh Politik Legendaris Dunia*. Penerbit Narasi.
- Adhi Cahya Fahadayna. (2013). *Pengaruh Ikhwanul Muslimin Terhadap Politik Luar Negeri Mesir Dalam Konflik Israel*

- Palestina*. Universitas Airlangga.
- Alterman, J. B. (1998). *Sadat and His Legacy: Egypt and the World, 1977-1997*. The Washington Institute.
- Arab-Israeli wars*. (n.d.). Britannica.
- Blanga, Y. U. (2015). Nasser's Dilemma: Egypt's Relations with the United States and Israel, 1967-69. *Middle Eastern Studies*, 51(2), 301-326. <https://doi.org/10.1080/00263206.2014.942648>
- Boutros-Ghali, B. (2012). The Foreign Policy Of Egypt The Post-Sadat Era. *Foreign Affairs*, 60(4), 769-788.
- Britannica.com. (n.d.). *Arab league*. <https://www-britannica-com/topic/Arab-League>
- Carter, J. (2024). *Camp David Accords Egyptian-Israeli history*. Britannica.
- Cohen-Almagor, R. (2019). Lessons from the israeli-egyptian peace talks: An interview with aharon barak. *Israel Studies Review*, 34(2), 1-32. <https://doi.org/10.3167/isr.2019.340202>
- Encyclopædia Britannica. (2024). *Nobel Prize*. Britannica.
- Farida, U. (2014). (2014). Peran Ikhwanul Muslimin Dalam Perubahan sosial Politik Di Mesir. *Jurnal Penelitian*, 8(1), 45-70.
- Freedman, R. O. (2019). *The Middle East Since Camp David*. Routledge.
- Garaudy, R. (2000). *Mitos dan Politik Israel*. Gema Insani.
- Glass, A. (2019). *Egypt, Israel conclude peace treaty, March 26, 1979*. Politico.
- Goldstein, Y. (2018). The Six Day War: the war that no one wanted. *Israel Affairs*, 24(5), 767-784. <https://doi.org/10.1080/13537121.2018.1505475>
- Gwladys Fouche. (2024). *Nobel Peace Prize: how does it work?* Reuters.
- Hermawati. (2005). *Sejarah Agama & Bangsa Yahudi*. PT Raja Grafindo Persada.
- history. (2020). *Jimmy Carter wins Nobel Peace Prize*. A&E Television Networks.
- Ian J. Bickerton dan Carla L. Klausner. (2019). *A History of The Arab-Israeli Conflict, (New York: Routledge, 2019), hlm. 78-79*. Routledge.
- Islamiyah, N., & Trilaksana, A. (2016). Aspek Historis Peranan Pbb Dalam Penyelesaian Konflik Palestina-Israel 1967-1955. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 4(3), 902-916.
- Isma Fauziyah, B. S. (2019). Resistensi Hegemoni Penguasa Mesir Dalam Novel Mudzakarati Fii Sijni Al Nisa (Kajian Hegemoni Gramsci). *Diwan :Jurnal Bahasa Dan Sastra Arab*, 5(1).
- Israeled.org. (n.d.). *Begin and Sadat Win the Nobel Peace Prize*.
- Jewish Virtual Library. (n.d.). *Timeline of Jewish History: Modern Israel & the Diaspora (1970 - 1979),.*
- Jim Hoagland. (1978). *Sadat and Begin Get Nobel Prize As Peacemakers*. Washingtonpost.
- Jr., L. H. L. (1981). On the murder of Anwar Sadat. *EIR*, 8(41).
- Kamel, M. I. (2011). *The Camp David Accord*. Routledge.
- Kamil, S. (2008). Sejarah Sosial Politik Mesir Kontemporer Periode Sadat dan Mubarak. *Jurnal Al-Turas*, 14(2), 112.
- Karta Raharja Ucu. (2021). *Bagaimana Zionis Yahudi Israel Menguasai Tanah Palestina?* Republika.
- Kassem, M. (2023). *The foreign policy of Anwar Sadat: continuity and change, 1970-1981*. PhD thesis. University of Oxford.
- Laura Zittrain Eisenberg dan Neil Caplan. (2010). *Negotiating Arab-Israeli Peace*. Indiana University Press.
- Meilasari, P. (2011). *Mesir pada masa pemerintahan Anwar Sadat: upaya Anwar Sadat dalam perdamaian Mesir Israel*. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/401>
- Meilasari, Putri. (2011). *Mesir Pada Masa*

- Pemerintahan Anwar Sadat: Upaya Anwar Sadat dalam Perdamaian Mesir Israel*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Misri A. Muchsin. (2015). Palestina dan Israel: Sejarah, Konflik dan Masa Depan. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 39(2), 199. <http://jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id/index.php/jurnalmiqot/article/view/32/20>
- Niyazi Gunay. (2000). *Arab League Summit Conferences, 1964–2000*. Washingtonpost.
- Noor, Y. (2014). *Sejarah Timur Tengah (Asia Barat Daya)*. Penerbit Ombak.
- Nurdiassa, A. (2015). *Dampak Kebijakan Rekonsiliasi Mesir terhadap Israel dalam Perjanjian Camp David 1979-1989*, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015), hlm. 8. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Peace Document. (1979). *Peace Treaty Between the State of Israel and the Arab Republic of Egypt*.
- Pearson, R. (1991). ALI SABRY, FORMER EGYPTIAN VICE PRESIDENT. The Washington Post.
- Peter M.Holt, Hopwood, D. (2024). *World War I and Independence-Egypt*. Britannica. <https://www.britannica.com/place/Egypt/World-War-I-and-independence>
- Pressman, J. (2022). Egypt, Israel, and the United States at the Autonomy Talks, 1979. *Diplomacy & Statecraft*, 33(3), 543–565. <https://doi.org/10.1080/09592296.2022.2113259>
- Procel, W., & Jednaszewski, P. (2020). *The Transformation of the Egyptian Foreign Policy from Presidents Sadat to Mubarak in the shadow of the First Intifada The Transformation of the Egyptian Foreign Policy from Presidents Sadat to Mubarak in the shadow of the First Intifada*. December.
- Ron David. (2007). *Arab dan Israel untuk Pemula*. Resist Book.
- Sadat, A. (1983). *Anwar el-Sadat Mencari Identitas: Sebuah Autobiografi*. Tira Pustaka.
- Sa‘dāwī, N., & Booth, M. (1994). *Memoirs from the Women’s Prison*. University of California Press.
- Shlomo, Y. (2017). The Israeli-Egyptian talks at kilometer 101. *British Journal of Middle Eastern Studies*, 44(3), 447–463. <https://doi.org/10.1080/13530194.2016.1207504>
- Sihbudi, M. R. (1991). *Islam, Dunia Arab, Iran: Bara Timur Tengah*. Mizan.
- Sihbudi, R. (2007). *Menyandera Timur Tengah: Kebijakan AS dan Israel atas Negara-negara Timur Tengah*. Mizan.
- Sorby, K. R. (2021). Anwar as-sĀdĀt ushers in a new era in soviet-egyptian relations, 1970 – 1971. *Asian and African Studies*, 30(1), 75–96. <https://doi.org/10.31577/aassav.2021.30.1.04>
- Treston Paul Chandler. (2016). *Jimmy Carter and Anwar el-Sadat: Relationships and Motivations Behind the 1978 Camp David Accords*. 1.
- Ulum, M. (2019). *Perjanjian Camp David dan Dampaknya terhadap Hubungan Mesir dengan Negara-negara Arab pada Masa Pemerintahan Anwar Sadat Tahun 1970-1981*. Universitas Jember.
- Wagner, H. L. (2007). *Anwar Sadat and Menachem Begin*. Infobase Publishing.
- Widyarsa, M. R. (2014). Rezim Militer dan Otoriter di Mesir, Suriah dan Libya. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 1(4), 273–283.
- Yahel, I. (2016). Covert Diplomacy Between Israel and Egypt During Nasser Rule: 1952-1970. *SAGE Open*, 6(4).